



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG PENGEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN REFORMASI BIROKRASI**

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120 Telepon (021) 85910336, 85910031,
Faksimile (021) 021-85905504 Website <http://www.bpkp.go.id>



**BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN
BIDANG PENGEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN
REFORMASI BIROKRASI**

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120 Telepon
(021) 85910336, 85910031,
Faksimile (021) 021-85905504 Website
<http://www.bpkp.go.id>

Nomor	:	LBA .../D.../2022	April 2022
Lampiran	:	Satu Berkas	
Hal	:	Laporan Kegiatan Pendampingan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan I Tahun Anggaran 2022 pada Inspektorat Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	

**Yth. Inspektur Utama BRIN
di Jakarta**

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kegiatan Pendampingan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan I Tahun Anggaran 2022 pada Inspektorat Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan industri.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri
7. Inpres Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
9. Inpres Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
10. Permenperin 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
11. Surat Deputi Kepala BPKP Bidang PIPP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor S-117/D1/01/2022 Tanggal 8 Maret 2022 tentang Pelaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian dan Lembaga Triwulan I Tahun Anggaran 2022.
12. Surat Tugas Direktur Pengawasan Bidang Nomor ST-26/D205/1/2022 Tanggal 15 Maret 2022 tentang Pendampingan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan I Tahun Anggaran 2022 pada Inspektorat Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Bimtek adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman teknis atas kegiatan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa kepada APIP K/L.
2. Mengarahkan tim reviu untuk mendapatkan dan menyajikan informasi hasil reviu yang akurat untuk dilakukan *entry* data ke dalam aplikasi BPKP.
3. Memantau proses pengisian data/informasi hasil reviu dalam sistem aplikasi BPKP sesuai dengan jadwal kegiatan reviu.

3. Ruang Lingkup dan Batasan Tanggung Jawab

Ruang lingkup kegiatan Bimtek yang dilakukan oleh Tim BPKP terbatas pada pelaksanaan reviu, kesesuaiannya dengan pedoman reviu PBJ Tahun 2022 dan pelaksanaan metodologi reviu, tidak termasuk kebenaran data dan informasi yang diinput ke dalam aplikasi BPKP.

Tanggung jawab tim bimtek terbatas pada proses reviu sesuai Pedoman Reviu PBJ Tahun 2022. Data target dan realisasi yang direviu oleh Inspektorat merupakan tanggung jawab manajemen, sedangkan simpulan hasil reviu menjadi tanggung jawab tim reviu.

4. Metodologi

Kegiatan Bimtek atas Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan metodologi sebagai berikut:

1. Bimbingan teknis dalam rangka pengumpulan data, penelaahan dokumen, dan penyusunan Kertas Kerja Reviu;
2. Bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait untuk mengetahui penyebab tidak tercapainya target (metode *Root Cause Analysis*) dan informasi bila ada permasalahan lainnya;
3. Pemberian bimbingan dan konsultasi dalam proses *entry* data hasil reviu ke dalam aplikasi BPKP;
4. Penyusunan Laporan Kegiatan Bimtek atas Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa.

5. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pendampingan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan I Tahun Anggaran 2022 pada Inspektorat Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai tanggal 15 Maret s.d. 28 Maret 2022.

6. Hasil Kegiatan

Dari hasil kegiatan Pendampingan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan I Tahun Anggaran 2022 pada Inspektorat Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah diperoleh sebagai berikut:

1. Tim Reviu Inspektorat BRIN telah memahami teknis pelaksanaan reviu atas penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa yang dilakukan.

2. Tim Reviu telah melakukan konfirmasi ke masing-masing Pokja dan Pengelola barang/jasa untuk dapat menyajikan informasi yang akurat dan diinput ke dalam aplikasi BPKP.
3. Telah dilakukan proses pengisian data/informasi hasil reviu dalam sistem aplikasi PAPBJ sesuai dengan jadwal kegiatan reviu.

Beberapa simpulan atas hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ Triwulan I Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan oleh Tim Reviu Inspektorat BRIN adalah sebagai berikut:

1. Rencana dan Realisasi Anggaran Belanja

Realisasi penyerapan anggaran belanja Triwulan I Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp516.072.045.631,00 atau 46,58% dari rencana penyerapan dana Triwulan I sebesar Rp1.107.966.141.000,00 dan 8,46% dari total pagu anggaran Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Rencana Penyerapan Dana Triwulan Ini (Rp)	Realisasi Penyerapan Dana Triwulan Ini (Rp)	% Realisasi Penyerapan Dana atas Rencana s.d Triwulan Ini
1	Belanja Pegawai	497.597.072.000,00	369.594.781.427,00	74,28%
2	Belanja Barang	242.730.876.000,00	58.878.801.790,00	24,26%
3	Belanja Modal	367.638.193.000,00	87.598.462.414,00	23,83%
4	Belanja Bantuan Sosial	6.436.772.491.000,00	0	0,00%
5	Belanja Lainnya	0	0	0,00%
	Jumlah	1.107.966.141.000,00	516.072.045.631,00	46,58%

Permasalahan realisasi penyerapan anggaran per jenis Belanja adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Triwulan I Tahun Anggaran 2022 rendah, dibawah 90% dari rencana yang telah ditetapkan.

Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Rencana penarikan dana untuk belanja pegawai dihitung dengan memperkirakan jumlah pegawai Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dari Kementerian/Lembaga lain yang akan bergabung dengan BRIN sehingga belum bisa diukur/dihitung dengan akurat.
- b. Proses pengintegrasian pegawai Litbang) dari Kementerian/Lembaga ke BRIN belum selesai.
- c. Belum seluruh peneliti dari Kementerian/Lembaga lain pindah ke BRIN.
- d. Struktur Organisasi Riset (OR) dan Pusat Riset (PR) sebagai tempat bernaung para peneliti di BRIN masih berubah-ubah.

- e. Masih dilakukan penentuan Struktur OR dan PR yang baik untuk dapat menampung seluruh pegawai litbang yang berasal dari K/L lain.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa masih belum terlaksana dengan optimal
- g. Terdapat blokir anggaran oleh Kementerian Keuangan.
- h. Pengadaan Barang/Jasa pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masih berupa paket (gelondongan) dan kurangnya penjelasan terkait urgensi penganggaran pada Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- i. SDM belum mampu menyusun RKA dan KAK dengan baik.
- j. Belum adanya pelatihan/bimtek/sosialisasi mengenai penyusunan RKA dan KAK.
- k. Proses pemetaan pegawai BRIN belum selesai.

Rencana tindak untuk mempercepat realisasi penyerapan anggaran adalah:

- a. Mempercepat penetapan struktur Organisasi Riset dan Pusat Riset.
- b. Mempercepat proses peralihan pegawai Litbang dari Kementerian/Lembaga lain ke BRIN.
- c. Segera menindaklanjuti buka blokir anggaran sesuai arahan DJA.
- d. Melakukan input seluruh rencana pengadaan pada Aplikasi Sistem Informasi dan Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
- e. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- f. Melakukan pelatihan/bimtek/sosialisasi penyusunan RKA dan KAK sesuai peraturan yang berlaku.
- g. Mempercepat proses pemetaan pegawai.

2. Rencana dan Realisasi SiRUP Pengadaan Barang/Jasa

Realisasi pengadaan tender yang sudah diinput di aplikasi SiRUP Triwulan I Tahun 2022 sebanyak 234 paket atau sebesar Rp660.394.799.311,00% dari 2212 paket dengan nilai sebesar Rp3.473.929.889.414,17 atau sebesar 37,51% dari nilai rencana tender yang harus diinput di SiRUP.

No	Uraian	Rencana Tender Harus Input di SIRUP		Pengadaan Tender Sudah Input di SIRUP		% Realisasi terhadap Rencana s.d Triwulan Ini	
		Jumlah PBJ (Paket)	Nilai PBJ (Rp)	Jumlah PBJ (Paket)	Nilai PBJ (Rp)	Jumlah PBJ (Paket)	Nilai PBJ (Rp)
1.	Belanja Barang	1.975	1.295.460.247.414,17	208	229.960.751.482,00	10,53%	17,75%
2.	Belanja Modal	237	2.178.469.642.000,00	26	430.434.047.829,00	10,97%	19,76%
3.	Belanja Sosial	0	0	0	0	0	0

Permasalahan realisasi pengadaan tender yang belum diinput di SiRUP per jenis belanja K/L adalah sebagai berikut:

- a. Sebagian Rencana Umum Pengadaan/RUP Belanja Barang dan Modal belum diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sejak awal Tahun Anggaran berjalan;

Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Pada saat penyusunan RUP terkendala dari sisi RKA KL yang masih gelondongan/belum dirinci sehingga tidak dapat mencerminkan setiap paket.
- b. Belum ada kejelasan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- c. Rencana paket pengadaan yang tertuang dalam RAB dan KAK menunggu usulan dari koordinator/subkoordinator dari masing-masing wilayah/kawasan.
- d. Koordinator dan subkoordinator wilayah baru terbentuk pada bulan Januari-Februari 2022 sehingga informasi kebutuhan awal belum dapat ditentukan.
- e. Masa peralihan pengintegrasian empat Lembaga dan satu Kementerian menjadi BRIN.

Rencana tindak untuk mempercepat realisasi pengadaan tender untuk diinput di SiRUP adalah:

- a. Melakukan koordinasi dengan user melalui Koordinator dan Subkoordinator wilayah untuk memastikan kebutuhan pengajuan belanja barang/jasa termasuk data dukung spesifikasi dan harga barang/jasa;
- b. Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) sesuai kebutuhan dan diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

3. Rencana dan Realisasi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui tender yang sudah tanda tangan kontrak sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 230 paket dengan nilai Rp562.849.263.721,00 atau 85,23% dari total PBJ tender yang sudah diinput di SiRUP, dengan rincian sebagai berikut:

Posisi PBJ Melalui Tender	Jumlah Paket	Nilai (Rp)
PBJ melalui tender yang sudah diinput di SiRUP	234	660.394.799.311,00
PBJ melalui tender yang sudah dilakukan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya	234	660.394.799.311,00

PBJ melalui tender yang sudah tanda tangan kontrak	230	562.849.263.721,00
--	-----	--------------------

Tidak terdapat rencana PBJ melalui tender yang belum dilakukan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

Terdapat rencana PBJ melalui tender yang telah dilakukan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya namun belum ditandatangani kontraknya sebesar 4 paket dengan nilai Rp97.545.535.590,00.

Hal ini disebabkan oleh:

- a. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan/RUP belum selesai;
- b. Pada saat penyusunan RUP terkendala dari sisi RKA KL yang masih gelondongan/belum dirinci sehingga tidak dapat mencerminkan setiap paket;
- c. Belum ada kejelasan RAB dan KAK;
- d. Informasi kebutuhan awal belum dapat ditentukan;
- e. Koordinator dan subkoordinator baru terbentuk pada bulan Januari-Februari Tahun 2022.

Rencana tindak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan user melalui Koordinator dan Subkoordinator untuk memastikan kebutuhan pengajuan belanja barang/jasa termasuk data dukung spesifikasi dan harga barang/jasa, selanjutnya menginput rencana pengadaan pada Aplikasi SiRUP dan segera memproses pengadaan tender sampai penandatanganan kontrak.

4. Rencana dan Realisasi Progress Fisik pekerjaan

Tidak terdapat kontrak yang mengalami keterlambatan realisasi fisik dibandingkan dengan rencana capaian fisik kontrak.

5. Rencana dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi penerimaan PNBP Triwulan I Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp29.415.455.575,00 atau 41,68% dari rencana penerimaan Triwulan I sebesar Rp70.579.500.000,00,00 atau 8,50% dari total rencana penerimaan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Belanja	Total Rencana PNBP (Rp)	Rencana Penerimaan Triwulan Ini (Rp)	Realisasi Penerimaan Triwulan Ini (Rp)	% Realisasi penerimaan atas Rencana Triwulan Ini	% Realisasi Penerimaan Setahun
Jumlah	346.250.016.00 0,00	70.579.500.000 ,00	29.415.455.575 ,00	41,68%	8,50%

Permasalahan realisasi penerimaan PNBP yang belum mencapai target/rencana

disebabkan antara lain:

- (1) Kerjasama dengan mitra/pihak luar yang belum banyak
- (2) Organisasi/satuan kerja masih proses persiapan/promosi /penjajakan
- (3) Organisasi/satuan kerja penghasil PNBP merupakan organisasi/satuan kerja yang baru terbentuk

Rencana tindak untuk mempercepat realisasi penyerapan anggaran adalah mengoptimalkan proses persiapan/perencanaan/penjajakan dan memonitoring pelaksanaan PNBP.

6. Sampling Pengadaan Barang/Jasa
7. Inspektorat **sudah** melakukan sampling PBJ terhadap tiga paket dengan nilai Rp157.866.920.706,00 dengan memperhatikan faktor risiko pelaksanaan PBJ yang disampling dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	% Realisasi Fisik	% Realisasi Pembayaran
1	Pengadaan Jasa Keamanan Kawasan Sains dan Teknologi BRIN TA 2022	34.572.645.881,00	16,67%	16,67%
2	Pengadaan Jasa Kebersihan KST BRIN TA 2022	26.123.069.156,00	16,67%	16,67%
3	Pengadaan Jasa Alih daya Kebersihan, Keamanan, Pengemudi dan	97.171.205.669,00	25,00%	36,00%

	Sekretaris Tahun 2022			
--	--------------------------	--	--	--

Adapun permasalahan yang ditemui pada masing-masing sampling adalah dalam dokumen KAK tidak mencantumkan informasi tentang penggunaan Produk Dalam Negeri yang dituangkan dalam Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), Penggunaan produk bersertifikat SNI, Penggunaan produk industri hijau, dan spesifikasi teknis rinci.

Data sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan pengisian pada aplikasi PAPBJ pada Tanggal 25 Maret 2022.

8. Rencana dan Realisasi Penggunaan Produk UMKM dan Produk Dalam Negeri (PDN)

Realisasi Penggunaan Produk UMKM dan Produk Dalam Negeri (PDN) Triwulan I Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp270.374.422.966,00 atau 42,00% dari rencana penerimaan Triwulan I sebesar Rp643.757.130.110,00 atau 19,78% dari total rencana penerimaan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	Penggunaan Produk UMKM/PDN/Impor dalam PBJ	Rencana Triwulan Ini (Rp)	Realisasi Triwulan Ini (Rp)	% Realisasi atas Rencana Triwulan Ini
1.	Produk UMKM	295.249.778.201,00	118.861.028.423,00	40,26%
2.	PDN	330.507.351.909,00	151.513.394.543,00	45,84%
3.	Produk Impor	18.000.000.000,00	0	0.00%
4.	Klausul persyaratan TKDN dalam Dokumen Pengadaan		0	
5.	Klausul persyaratan TKDN dalam Dokumen Penawaran		0	
6.	Preferensi harga terhadap peserta yang menyatakan		0	

No	Penggunaan Produk UMKM/PDN/Imp or dalam PBJ	Rencana Triwulan Ini (Rp)	Realisasi Triwulan Ini (Rp)	% Realisasi atas Rencana Triwulan Ini
	klausul TKDN dalam dokumen evaluais penawaran			
	Jumlah	643.757.130.110,00	270.374.422.966,00	42,00%

Permasalahan realisasi penggunaan produk UMKM/PDN adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi belanja produk UMKM dari belanja PBJ masih rendah.
- b. Realisasi Paket Pengadaan P3DN belum sesuai dengan alokasi rencana pengadaan P3DN.
- c. Realisasi paket pengadaan Import masih belum sesuai dengan alokasi rencana pengadaan import.
- d. Dokumen pengadaan belum menyatakan klausul persyaratan TKDN.
- e. Dokumen Penawaran belum menyatakan klausul TKDN.
- f. Dokumen Evaluasi penawaran yang telah memberikan preferensi harga terhadap peserta belum menyatakan klausul TKDN.

Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai timeline
- b. Pelaksanaan pengadaan mundur dari perencanaan
- c. Adanya blokir anggaran yang masih dilakukan oleh DJA yang mengakibatkan realisasi terhambat
- d. Beberapa kegiatan banyak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan rapat/FGD
- e. Perencanaan kurang matang
- f. Adanya perubahan organisasi yang mempengaruhi perencanaan dan realisasi penganggaran
- g. Belum terbentuknya Pokja P3DN di lingkungan BRIN sehingga pengadaan P3DN belum optimal
- h. Keterbatasan sumber daya yang memahami konsep P3DN
- i. Masih menunggu usulan dari user terkait kebutuhan dan spesifikasi teknis
- j. Kebijakan manajemen BRIN terkait pembuatan proposal
- k. Proses reviu/koreksi proposal oleh Tim Rumah Program belum selesai

- l. Jumlah proposal yang masuk dari user untuk direviu makin bertambah
- m. Proses reviu dan revisi proposal memerlukan waktu yang lebih lama
- n. Ketidaktauan SDM bahwa pada dokumen pengadaan harus menyatakan klausul persyaratan TKDN
- o. SDM belum mampu menyusun dokumen pengadaan dengan baik
- p. Pemahaman penerapan TKDN belum masif dilingkungan BRIN khususnya unit teknis/user
- q. Belum dilakukan sosialisasi/pelatihan terkait TKDN

Rencana tindak untuk mempercepat penggunaan produk UMKM/PDN adalah:

- a. Segera menindaklanjuti buka blokir, selanjutnya mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional dengan melaksanakan kegiatan prioritas yang menggunakan produk UMKM
- b. Agar segera dibentuk Pokja P3DN sebagai tim yang bertanggung jawab memonitor pengadaan P3DN sehingga pengadaan P3DN dapat dilakukan dengan optimal
- c. Tim Rumah Program dan user agar melakukan percepatan proses reviu dan revisi proposal
- d. Manajemen BRIN agar melakukan sosialisasi dan pelatihan TKDN terhadap pegawai yang terlibat dalam penanganan pengadaan barang/jasa
- e. Penyusunan Kebijakan penerapan TKDN dalam kegiatan pengadaan barang/jasa
- f. Segera menyusun rencana sosialisasi/bimtek/pelatihan internal mengenai P3DN

Terdapat rencana penganggaran atas penggunaan produk impor atas pengadaan peralatan pengujian vaksin dari satker kedeputian Infrastruktur riset dan peralatan penunjang penelitian di laboratorium inovasi oleh satker Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Kebumian. Hal ini disebabkan peralatan tersebut belum ada diproduksi di dalam negeri.

Selain itu, dalam pengadaan barang/jasa Triwulan I Tahun 2022, terdapat kondisi sebagai berikut:

- a. **Tidak terdapat** Pokja/Tim P3DN
- b. **Tidak terdapat** program pengawasan terhadap Kepatuhan P3DN dalam PKPT Pengawasan APIP K/L

7. Hal-hal Penting yang Perlu Diperhatikan

Tidak terdapat hal-hal penting yang harus diperhatikan.

8. Permasalahan/Kendala yang Dihadapi Selama Pendampingan/Bimtek

Tidak terdapat permasalahan/kendala yang dihadapi selama bimtek.

9. Saran

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami menyarankan kepada Kepala BRIN agar:

- a. Mempercepat penetapan struktur Organisasi Riset dan Pusat Riset
- b. Mempercepat proses peralihan pegawai litbang dari Kementerian/Lembaga lain ke BRIN
- c. Segera menindaklanjuti buka blokir anggaran sesuai arahan DJA
- d. Melakukan input seluruh rencana pengadaan pada Aplikasi SiRUP
- e. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
- f. Melakukan pelatihan/bimtek/sosialisasi penyusunan RKA dan KAK sesuai peraturan yang berlaku
- g. Mempercepat proses pemetaan pegawai
- h. Melakukan koordinasi dengan user melalui Koordinator dan Subkoordinator wilayah untuk memastikan kebutuhan pengajuan belanja barang/jasa termasuk data dukung spesifikasi dan harga barang/jasa;
- i. Menyusun RUP sesuai kebutuhan dan diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
- j. Melakukan koordinasi dengan user melalui Koordinator dan Subkoordinator untuk memastikan kebutuhan pengajuan belanja barang/jasa termasuk data dukung spesifikasi dan harga barang/jasa, selanjutnya menginput rencana pengadaan pada Aplikasi SIRUP dan segera memproses pengadaan tender sampai penandatanganan kontrak
- k. Mengoptimalkan proses persiapan/perencanaan/penjajakan dan memonitoring pelaksanaan PNB
- l. Dalam dokumen KAK mencantumkan informasi: penggunaan Produk Dalam Negeri yang dituangkan dalam Tingkat Kandungan dalam negeri (TKDN), Penggunaan produk bersertifikat SNI, Penggunaan produk industri hijau, spesifikasi teknis rinci
- m. Segera menindaklanjuti buka blokir, selanjutnya mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional dengan melaksanakan kegiatan prioritas yang menggunakan produk UMKM

- n. Agar segera dibentuk Pokja P3DN sebagai tim yang bertanggung jawab memonitor pengadaan P3DN sehingga pengadaan P3DN dapat dilakukan dengan optimal
- o. Tim Rumah Program dan user agar melakukan percepatan proses rewiu dan revisi proposal
- p. Manajemen BRIN agar melakukan sosialisasi dan pelatihan TKDN terhadap pegawai yang terlibat dalam penanganan pengadaan barang/jasa
- q. Penyusunan Kebijakan penerapan TKDN dalam kegiatan pengadaan barang/jasa
- r. Segera menyusun rencana sosialisasi/bimtek/pelatihan internal mengenai P3DN
- s. Membuat program pengawasan terhadap Kepatuhan P3DN dalam PKPT Pengawasan APIP K/L

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur,

.....
NIP

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris K/L
2. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman